

ASIA - PACIFIC SPACE COOPERATION ORGANIZATION (APSCO) SEBAGAI STRATEGI TIONGKOK MEMBENTUK CONFIDENCE BUILDING MEASURE DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Andi Sufriana Nur Utami

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia**

Email : sufrianautami@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas inisiatif pembentukan *Asia - Pacific Space Cooperation Organization* (APSCO) yang merupakan organisasi kerjasama keantariksaan di luar sistem PBB untuk wilayah Asia Pasifik yang diinisiasi oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kerjasama multilateral ini terdiri dari Tiongkok, Bangladesh, Tiongkok, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Thailand. Kajian terdahulu mengenai APSCO hanya memaparkan inisiatif pembentukan kerjasama ini dengan melihat hasil dari kerjasama multilateral ini di kawasan Asia Pasifik yang tersebar ke dalam tiga sudut pandang yaitu politik domestik, hukum internasional dan stabilitas kawasan dan belum ada yang menegaskan secara teoritik maksud tujuan dari Tiongkok menginisiasi kerjasama antariksa ini. Dengan menggunakan konsep *Confidence Building Measure (CBMs)* sebagai kerangka analisis tulisan ini akan menjelaskan tujuan dari pemerintah Tiongkok membentuk kerjasama antariksa di kawasan Asia Pasifik. Argumen utama dalam penulisan ini adalah sangat penting untuk Tiongkok meningkatkan kepercayaan internasional dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik pada sektor antariksa dimana sebelumnya Amerika Serikat dengan aliansinya sudah terlebih dahulu memiliki aktivitas antariksa yang signifikan di kawasan ini.

Kata Kunci : APSCO, Tiongkok, Kawasan Asia Pasifik, *Confidence Building Measure (CBMs)*.

Abstract

This paper discusses the initiative to form the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) which is a space cooperation organization outside the United Nations system for the Asia Pacific region. The APSCO is initiated by the government of the People's Republic of China. The member of APSCO are China, Bangladesh, China, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru and Thailand. The previous study on APSCO only explained the initiative of forming this collaboration by looking at the results of this multilateral cooperation in the Asia Pacific region which was spread into three points of view, namely domestic politics, international law and regional stability. Unfortunately, there is none of the study has theoretically confirmed the intentions of China to initiate cooperation. This paper will explain the purpose of the Chinese government to establish space cooperation in the Asia Pacific region through the concept of Confidence Building Measures (CBMs) as an analytical framework. The main argument of this paper is very important for China to increase international confidence and its influence in the Asia Pacific region in the space sector where the United States and its allies already had significant space activity in this region.

Keywords: APSCO, China, Asia Pacific Region, *Confidence Building Measures (CBMs)*.

PENDAHULUAN

Kerjasama multilateral khususnya pada sektor antariksa mewarnai dinamika politik di kawasan Asia Pasifik seiring dengan peningkatan aktivitas antariksa di kawasan ini. Kebijakan mengenai antariksa tidak dapat lagi dilihat sebagai sektor yang sepenuhnya damai. Kerjasama yang tidak diatur antara negara-negara dalam sektor antariksa baik itu secara bilateral, multilateral, ataupun regional dapat memicu timbulnya rasa tidak aman. Hal ini kemudian menunjukkan pentingnya keterlibatan negara-negara dalam suatu kawasan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam sektor antariksa. Di tahun 2003, Tiongkok menginisiasi pembentukan kerjasama multilateral baru dengan nama *Asia - Pacific Space Cooperation Organization* selanjutnya akan disingkat dengan APSCO (Chaudhry dan Wei, 2013). Titik awal inisiatif APSCO ditandai dengan adanya laporan aktivitas keantariksaan Tiongkok tahun 2000 yang merupakan pernyataan publik pertama yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan dan menjelaskan seberapa pentingnya program keantariksaan bagi Tiongkok (Govt. White Papers, 2000). Hal ini yang kemudian membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama multilateral dalam teknologi di sektor antariksa dengan kawasan Asia Pasifik. Dengan tujuan utama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi regional dan pemantauan bencana alam dan alam dengan teknologi keantariksaan (Gilks, 1997: 219).

Dalam melakukan aktivitas antariksanya, Tiongkok memiliki prinsip-prinsip yang mengikuti prinsip pembangunan jangka panjang, stabil dan berkelanjutan serta dapat membuat pengembangan kegiatan keantariksaan yang bisa berkontribusi dalam melayani strategi pembangunan negara yang komprehensif, menegakkan prinsip independensi, kemandirian dan secara aktif mempromosikan kerjasama. Tiongkok akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk selalu membuat terobosan baru dalam teknologi keantariksaan.¹ Tiongkok melakukan terobosan di bidang-bidang utama sesuai dengan situasi dan kekuatan nasional, dan mengutamakan manfaat sosial dan ekonomi dari program keantariksaan dan selalu menjunjung perkembangan teknologi yang mandiri serta berpegang pada perencanaan terpadu, kombinasi pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek, penggunaan sektor antariksa dan peralatan darat yang terkoordinasi. Dengan prinsip - prinsip tersebut maka, Tiongkok memetakan prioritas wilayah kerjasamanya dengan (1) Secara aktif meningkatkan kerja sama multilateral dalam teknologi dan aplikasi antariksa di kawasan Asia Pasifik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi regional dan pemantauan bencana alam dan

¹ Tiongkok belum banyak berinvestasi dalam teknologi aplikasi sebelum tahun 2000, pemerintah Tiongkok berusaha mendapatkan teknologi satelit aplikasi dari produsen asing. Namun, pembatasan kontrol ekspor Amerika Serikat, yang dikenal dengan *International Traffic in Arms Regulation* (ITAR), menempatkan teknologi satelit dan antariksa sebagai barang yang dikontrol. Pada dasarnya ini bentuk dari “pengasingan” Tiongkok dari pasar teknologi keantariksaan internasional. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok sadar bahwa mereka harus berinvestasi dalam teknologi aplikasi dalam negeri untuk memenuhi permintaan akan infrastruktur dan layanan berbasis antariksa . <https://gov-relations.com/itar/> diakses pada tanggal 26 maret 2019.

alam dengan teknologi keantariksaan. (2) Untuk Mendukung perusahaan keantariksaan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam layanan peluncuran komersial antariksa internasional sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. (3) Untuk memberikan dorongan dalam menggunakan teknologi keantariksaan Tiongkok dan memberikan layanan kepada negara-negara yang bekerja sama atas dasar kepentingan untuk saling menguntungkan. (4) untuk mendukung kerjasama dalam pemantauan lingkungan bumi dan eksplorasi lingkungan antariksa.

Bedasarkan bentuk prioritas wilayah kerjasama tersebut kemudian inisiatif APSCO merupakan realisasi dari bentuk kerjasama yang secara aktif meningkatkan aktivitas multilateral dalam teknologi dan aplikasi antariksa di kawasan Asia Pasifik. Demi mencapai tujuan tersebut Tiongkok menyediakan beberapa bentuk kerjasama di APSCO yaitu untuk mempromosikan dan memperkuat pengembangan kolaborasi program antariksa antara negara anggota dengan mendirikan dasar bagi kerjasama dalam aplikasi damai ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa, Menyusun kebijakan industri untuk memenuhi persyaratan dari program dan kegiatan serta program kolaboratif dengan negara anggota, dengan cara yang hemat biaya dan penerapan sistem "*fair-return*", mengatur aktivitas dasar organisasi, yang harus didasari pada kepentingan organisasi dan Organisasi akan merekomendasikan dan mengatur penerapan ilmu keantariksaan yang akan digunakan, program teknologi antariksa serta penerapannya untuk diimplementasikan bersama oleh negaranegara anggota, yang memilih untuk berpartisipasi dalam program tersebut (Gilks, 1997: 217).

APSCO terbentuk dengan ditandatanganinya konvensi oleh delapan Negara yaitu Bangladesh, Iran, Indonesia, Mongolia, Pakistan, Peru, Tiongkok dan Thailand. Turki menjadi negara kesembilan yang menandatangani konvensi APSCO. Dari kesembilan negara ini hanya Indonesia yang belum menjadi anggota APSCO karena belum meratifikasi konvensi APSCO dimana ratifikasi merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota. Delapan Negara ini sudah menunjukkan ketertarikannya pada sektor ruang angkasa dimana negara-negara tersebut sudah memiliki aktivitas antariksa di tingkat nasional, seperti Bangladesh yang memiliki *Bangladesh Space Research And Remote Sensing Organization (SPARRSO)*. Organisasi ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah dan berfokus pada teknologi dan penelitian mengenai ruang angkasa. SPARRSO terlibat dalam penerapan multidisiplin teknologi dan penginderaan jarak jauh untuk mensurvei sumber daya alam, untuk menyelidiki berbagai masalah dan proses lingkungan serta untuk memantau berbagai kemungkinan bahaya alam yang terjadi di Bangladesh (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Bangladesh". <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Bangladesh/2018-06-25/14-146-1.shtml>, diakses 10 September 2019). Selain itu Negara Irak membentuk *Iranian Space Agency (ISA)* yang merupakan agen ruang angkasa pemerintah Iran. Iran menjadi salah satu Negara yang memiliki kemajuan teknologi di sector ruang angkasa, hal ini dibuktikan pada tahun 2009 negara ini mampu meluncurkan satelit

pertamanya. Iran adalah salah satu dari 24 anggota pendiri UNCOPUOS. ISA didirikan pada 1 Februari 2004 sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang untuk Tugas dan Otorisasi dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang disahkan pada 10 Desember 2003 oleh Parlemen Iran (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Iran", <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Iran/2018-06-27/46-159-1.shtml>, diakses 10 September 2019).

Mongolia juga memiliki *Communication And Information Technology Authority* (CITA) bekerja atas nama pemerintah Mongolia untuk kegiatan di sektor ruang angkasa. Kegiatan penelitian ini dimulai di bawah program ruang angkasa INTERCOSMOS. Stasiun penerima data satelit yang pertama dimulai pada awal tahun 1970. Di bawah program ini Mongolia menjadi negara kedua di Asia dan negara kesepuluh di dunia untuk mengirim astronot ke ruang angkasa (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Mongolia". <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Mongolia/2019-02-20/47-250-1.shtml>, diakses 10 September 2019). Sementara Pakistan memiliki aktivitas antariksa dengan *Space An Upper Atmosphere Research Commission* (SUPARCO) yang bertanggung jawab atas program ruang angkasa dan juga untuk penelitian akronotika. Didirikan pada 16 Sep 1961 oleh di Karachi. SUPARCO memiliki satelit pertama, Badr-I, dibangun oleh SUPARCO dan diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 1990. Instalasi yang diperluas di seluruh negeri, bekerja sama dalam penggunaan teknologi ruang angkasa dengan masyarakat internasional (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Pakistan", <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Pakistan/2018-07-03/48-168-1.shtml>, diakses 10 September 2019). Selanjutnya Thailand melalui *The Office Of National Digital Economy And Society Commission* (ONDE), Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat (MDES), memainkan peran utama dalam kebijakan dan peraturan ruang angkasa nasional, sedangkan Badan Pengembangan Teknologi Ruang Angkasa Geo-Informatika dan Teknologi (GISTDA) bertanggung jawab untuk teknologi ruang angkasa dan kegiatan geo-informasi. Pada tahun 2008, Satelit Pengamatan Farth pertama Thailand (THEOS-1), juga dikenal sebagai Thaichote, berhasil diluncurkan (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Thailand", <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Thailand/2018-07-03/50-169-1.shtml>, diakses 10 September 2019). Terakhir Turki mendirikan *Space Technologies Research Institute* (TUBITAK UZAY) pada tahun 1985 sebagai lembaga penelitian di sector ruang angkasa. Badan ini berfokus pada penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan lembaga yang berorientasi pada aplikasi dan memiliki kompetensi dalam teknologi satelit di tingkat sistem dan subsistem, namun, TUBITAK UZAY mendiversifikasikan minatnya ke dalam sistem komunikasi, sistem optik, penginderaan jauh dan pemrosesan data, serta teknologi dirgantara (Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Turkey", <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Turkey/2019-02-20/51-251-1.shtml>, diakses 10 September 2019).

Aktivitas antariksa di kawasan Asia Pasifik sudah berlangsung sejak tahun 1993 dimana Jepang menginisiasi terbentuknya *The Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF)*

Adapun kajian akademik terdahulu yang melihat inisiatif APSCO belum ada yang menegaskan secara teoritik maksud dari Tiongkok menginisiasi kerjasama antariksa ini. Kajian terdahulu mengenai inisiatif *Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)* di kawasan Asia Pasifik pada dasarnya tersebar ke dalam tiga perspektif besar, yaitu: (1) politik domestik (2) hukum internasional dan (3) stabilitas kawasan. Kajian yang menggunakan perspektif politik domestik mencoba untuk melihat inisiatif APSCO sebagai upaya untuk mendapatkan kepentingan bersama (Evgeniia, 2018), kepentingan strategis (Schreer, 2017), pembangunan domestik teknologi antariksa (Siddiqi, 2010), dan kepentingan ekonomi antariksa di kawasan Asia Pasifik (Hoa and Gorurb, 2017). Dapat dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama ini adalah adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh setiap anggota dan dapat diperoleh dengan menjadikan APSCO sebagai wadah kerjasama (Moltz, 2010).

Adapun kajian yang menggunakan perspektif hukum internasional mengulas inisiatif APSCO sebagai wadah untuk menghasilkan konvensi internasional (Nie, 2019), jaminan hukum ruang angkasa (Heifeng, 2012), perjanjian internasional dan mekanisme hukum dalam aktivitas antariksa di kawasan Asia Pasifik (Lijing, 2014). Yang menjadi argumen utama dalam kajian ini menjelaskan bahwa APSCO hadir sebagai lembaga yang akan menghasilkan seperangkat konvensi dan perjanjian yang akan menjadi acuan dalam melakukan aktivitas antariksa (Zhao, 2012). Selain itu kajian yang menggunakan perspektif stabilitas kawasan melihat APSCO sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas antariksa secara kompetitif (Moltz, 2011), prospek kerja sama regional (Marco, 2013), memperkuat program kolaborasi antariksa (Wan, 2017), pemanfaatan dari struktur regionalism (Zhao, 2016), dan ekspolarasi lingkungan antariksa (Suzuki, 2013). Adapun yang menjadi poin utama dalam kajian ini adalah stabilitas kawasan Asia pasifik menjadi permasalahan yang akan menjadi salah satu alasan untuk Negara anggota APSCO untuk memilih bergabung di dalam suatu kerjasama multilateral di sektor antariksa (Marco, 2013).

Argumen yang dibangun oleh kajian-kajian akademik terdahulu dapat kita rangkum sebagai berikut dinamika politik domestik negara - negara di Asia Pasifik melihat APSCO sebagai instrumen untuk memperoleh kepentingan bersama yang saling menguntungkan di sektor antariksa oleh setiap negara anggota. Dengan meningkatnya kemampuan antariksa Tiongkok dilihat sebagai peluang untuk mendorong peningkatan kemampuan antariksa di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan teknologi yang merupakan program APSCO memberikan dampak pada kondisi domestik yang dapat dilihat dari sektor ekonomi dengan adanya investasi pada sektor antariksa oleh Tiongkok. Sementara itu kajian yang melihat inisiatif APSCO dari perspektif hukum internasional berargumen bahwa APSCO hadir sebagai wadah untuk menghasilkan konvensi-

konvensi yang dinilai akan memberikan manfaat dan menguntungkan pengembangan teknologi ruang angkasa di kawasan Asia - Pasifik serta pentingnya mekanisme hukum dalam APSCO untuk memastikan keberlangsungan aktivitas negara-negara anggota di sektor antariksa.

Di sisi lain kajian-kajian terdahulu yang menggunakan sudut pandang yang melihat inisiatif APSCO dari perspektif stabilitas kawasan memaparkan bahwa organisasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam stabilitas kawasan Asia Pasifik di sektor antariksa. Tiongkok sebagai pemimpin yang menginisiasi pembentukan APSCO berhasil melakukan prospek kerjasama yang bermanfaat seiring dengan peningkatan kemampuan teknologinya. Adanya aktivitas antariksa secara kompetitif, prospek kerja sama regional, dan eksplorasi lingkungan antariksa akan memperkuat program kolaborasi antariksa oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Walaupun kita dapat menarik beberapa pelajaran akan tetapi kajian – kajian terdahulu belum menjelaskan alasan dibalik pembentukan APSCO oleh Tiongkok. Belum ada kajian yang menggunakan pendekatan untuk melihat bahwa *Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)* sebagai usaha Tiongkok sebagai aktor hegemon baru di kawasan Asia Pasifik untuk mendapatkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadi krusial karena peningkatan kapabilitas Tiongkok di sektor antariksa menimbulkan persepsi negatif dari negara - negara lain yang juga memiliki aktivitas di sektor ini. Kawasan Asia Pasifik telah memiliki aktor-aktor dominan seperti Amerika Serikat dengan aliansi Jepang yang terlebih dahulu mendirikan *Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF)* sebagai forum kerjasama di sektor antariksa (davi, 2009). Dinamika kompetisi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi penting di dalam kawasan Asia Pasifik khususnya di sektor antariksa. Kemampuan antariksa sebagai pilar kekuatan Tiongkok merupakan hal yang mendasari penggunaan antariksa sebagai instrumen untuk membentuk aliansi dan mitra diplomatiknya.

Berdasarkan serangkaian uraian dan argumen diatas, pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah mengapa Tiongkok berhasil menggunakan APSCO sebagai instrumen dalam membentuk *Confidence Building Measure (CBMs)* di kawasan Asia ? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pertama penulis akan menjabarkan mengenai *Confidence Building Measure (CBMs)* sebagai kerangka pemikiran yang menjadi acuan penulisan dan analisis, kedua tulisan ini akan menjelaskan keberhasilan inisiatif APSCO sebagai strategi *Confidence Building Measure (CBMs)*. Untuk menganalisa keberhasilan dari inisiatif APSCO sebagai upaya *Confidence Building Measure (CBMs)* di kawasan Asia Pasifik maka penulis akan mengelaborasi ketiga pemaparan mengenai CBMs. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah variabel komunikasi yang juga digunakan oleh Holst, Landau dan Fukushima. Adapun yang menjadi poin dalam variabel ini ialah mekanisme pertukaran informasi dalam APSCO. Kedua ialah variabel transparansi yang juga merupakan salah satu variabel yang digunakan oleh Holst, Landau dan Fukushima. Dan yang menjadi poin pembahasan dalam

variable ini adalah upaya verifikasi oleh APSCO. Dengan menggunakan variabel variabel ini akan menghasilkan penjelasan mengenai seberapa besar *trust building* yang telah dibentuk Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan APSCO sebagai instrumennya.

Penelitian ini menggunakan data – data yang bersumber dari buku, junal, berita daring serta report dan data dari portal resmi *Asia - Pacific Space Cooperation Organization* (APSCO). adapun data yang digunakan dalam analisis penelitian ini merupakan data dengan rentang tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Metode triangulasi dipilih untuk menyaring dan menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.

PEMBAHASAN

Confidence Building Measure (CBMs)

Konsep *Confidence Building Measure* hadir dari pemikiran strategis dalam menghadapi perkembangan dinamika keamanan politik internasional. Interaksi yang terjadi antar negara menghasilkan bentuk relasi yang beragam. Kerjasama ataupun konflik menjadi penentu hubungan antar negara tersebut. Perdamaian yang menjadi cita – cita dari setiap negara melahirkan berbagai konsep maupun teori dengan berbagai perspektif sebagai acuan dasar dan CBMs merupakan langkah-langkah awal baik secara unilateral, bilateral maupun multilateral yang ditujukan untuk mengurangi, mencegah tingkat ketidakpastian agar tidak terjadi konflik (Brad, 2005). Sejalan dengan kemajuan teknologi antariksa yang semakin signifikan dalam menentukan nasib hidup manusia dan lingkungan yang mengelilinginya, maka tentu saja semakin menambah tingkat ancaman yang ditimbulkan dari efek kegiatan antariksa yang ada (Lewis, 2007). Secara umum memang antariksa sulit untuk melepaskan diri dari ancaman dan tantangan yang serius dan negara-negara *spacefaring* menyadari hal itu sehingga dilakukanlah program - program untuk mengamankan dan menyelamatkan antariksa.

Sektor antariksa merupakan variabel pokok saat ini didalam kebijakan luar negeri yang diproduksi oleh para pemimpin negaranegara di dunia. Hal ini dikarenakan antariksa sekarang telah mengalami pertumbuhan yang penting dan signifikan bagi kehidupan di bumi, seperti ditemui pada peran satelit dan spacecraft yang berfungsi sangat kritis bagi ekonomi global (Lewis, 2007:23). Selain untuk mendukung aspek ekonomi, sector antariksa juga mengalami perkembangan yang penting khususnya bagi kepentingan dengan tujuan tujuan militer, dimana digunakan untuk operasi militer yang luas yang mencakup seluruh permukaan bumi. Sehingga akan timbul permasalahan besar yaitu keamanan antariksa akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional, tentunya hal ini disebabkan oleh potensi peran satelit selama suatu konflik berlangsung.

Menurut Holst terdapat empat komponen pendekatan dalam CBMs untuk mengukur perilaku negara, yaitu (1) Perangkat Komunikasi, (2) Tindakan Transparansi, dan (3) Tindakan Verifikasi (Holst, 1983). *Saluran komunikasi* antar negara khususnya pada kelompok negara yang rawan konflik akan sangat membantu dalam upaya meredakan ketegangan pada saat-saat kritis, disini peran dari CBM mampu menyediakan satu mekanisme konsultasi yang baik dan teratur. *Tindakan Transparansi*, tindakan yang bersifat transparansi ini meliputi langkah-langkah yang mampu mendorong keterbukaan yang lebih besar atas informasi kemampuan dan kegiatan militer. Upaya transparansi tersebut dapat mencakup persyaratan pra-notifikasi, pertukaran data, dan secara sukarela memberikan ijin untuk mengamati latihan militer dan prosedur operasi. *Tindakan Verifikasi*, tindakan verifikasi ini dirancang dalam rangka untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dari aspek kepatuhan negara terhadap perjanjian tertentu. Aspek kepatuhan ini termasuk di dalamnya adalah inspeksi udara dan inspeksi lapangan yang didasarkan kepada sistem sensor elektronik (Holst, 1983:8).

Sejalan dengan pendapat Holst, Menurut Landau terdapat empat komponen dalam CBMs yaitu (1) Deklarasi Informasi, (2) Prosedur komunikasi, dan (3) Pengamatan/observasi. Deklarasi Informasi merupakan kesepakatan untuk memberitahukan informasi kepada negara lainnya dalam hal suatu negara melakukan aktivitas militer. Deklarasi informasi merupakan elemen penting yang menyatakan hubungan dan komitmen dua negara atau sekelompok negara untuk mengikatkan diri dalam konsep CBMs. Prosedur komunikasi, yaitu mengatur mengenai jalur komunikasi yang disetujui oleh semua pihak untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut di atas. Pengamatan/observasi yaitu mengatur kegiatan pengamatan terkait dengan aktivitas militer yang diberitahukan, dapat dilakukan dengan pertukaran personil dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan. Dibutuhkan adanya kesepakatan bersama terhadap bentuk pengamatan yang akan dilakukan. Oleh karena inti dari CBMs adalah pembangunan rasa percaya antar negara, maka prinsip kerahasiaan informasi dan personil merupakan elemen terpenting bagi terlaksananya perjanjian di bidang pertahanan. CBMs berperan penting untuk mengurangi tendensi ancaman. Berdasarkan komponen tersebut demonstrasi akan keinginan untuk membina komunikasi (*demonstrate a willingness to talk*), untuk mendengarkan (*demonstrate a willingness to listen*), untuk mencapai kepentingan bersama (*demonstrate a willingness to meet the other's needs*), dan untuk mengembangkan kepercayaan (*demonstrate a willingness to building trust*) (Landau dan Landau, 1997).

Untuk melengkapi pemaparan mengenai CBMs sebagai suatu konsep maka Akiko Fukushima melihat dari perspektif multilateral. Fukushima menjelaskan bahwa dalam konteks multilateral CBMs terbatas pada ukuran transparansi dan tidak melibatkan ukuran pemaksaan seperti pelucutan senjata, kontrol senjata dan zona bebas nuklir (Fukushima, 2015). Transparansi ini sangat dibutuhkan dan menjadi tuntutan apabila berkenaan dengan masalah-masalah yang bersentuhan dengan keselamatan dan keamanan seluruh mahluk

penghuni dunia. Menurut Fukushima, dalam pengaplikasian CBMs pada hubungan multilateral menggunakan variabel pertukaran informasi, peran komunikasi, serta *built trust* oleh setiap actor dalam kerjasama multilateral (Fukushima, 2015). Untuk itu pendekatan-pendekatan strategis baik itu dilakukan dengan melalui pola-pola bilateral maupun multilateral menjadi suatu keniscayaan yang sulit terbantahkan, sehingga transparansi saat ini telah menjadi fokus dan "*tools*" dalam berdiplomasi dan hubungan internasional. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya interdependensi dan penyusutan dalam dunia internasional adalah kemajuan teknologi informasi yang didasarkan kepada kegiatan antariksa ((Holst, 1983:12).

Inisiatif APSCO sebagai strategi *Confidence Building Measure* (CBMs)

Hadirnya Tiongkok yang menjadi kekuatan baru dunia saat ini, bukan suatu proses yang singkat dan mudah didapatkan. Tiongkok berhasil menunjukkan bahwa negara ini muncul sebagai aktor yang diperhitungkan keberadaannya dengan melihat bagaimana Tiongkok mampu menjaga dinamika hubungannya di kawasan regional maupun secara global. Kehadiran peran internasional Tiongkok diperkuat dengan beberapa fakta yaitu Tiongkok merupakan Negara dengan kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat terbesar ke empat di dunia (Franklin, et.al. 2005). Selanjutnya posisi kekuatan militer Tiongkok sebagai negara yang memiliki kekuatan nuklir serta peran internasional yang dimiliki Tiongkok lainnya adalah sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang juga memiliki hak veto di PBB. Selain di PBB, Tiongkok juga memiliki peranan penting di WTO yang merupakan sarana untuk mempromosikan prinsip-prinsip yang diyakini oleh Tiongkok (Alice D, 2003).

Dengan adanya kemajuan di sektor antariksa Tiongkok menghadirkan respon yang berbeda dari dunia internasional. Inisiatif pembentukan APSCO oleh Tiongkok menjadi salah satu usaha negara ini untuk memperbaiki persepsi negatif negara-negara lain mengenai program-program antariksanya. Untuk negara *spacefaring*² lainnya Tiongkok dinilai sebagai ancaman nyata, hal ini ditandai dengan berhasilnya proyek Anti-satellite Tiongkok yang mengundang respon negatif karena dinilai menjadi titik awal terjadinya perlombaan senjata di sektor antariksa (Nuclear Technology Initiative, Tanpa Tahun). Selain itu proyek ASAT ini juga menghasilkan 3.000 potongan puing-puing luar angkasa (*space debris*)³ dan hasil puing antariksa ini menjadi

² *Spacefaring nation* adalah sebutan untuk negara yang memiliki kendaraan luar angkasanya sendiri dan mampu melakukan perjalanan ke luar angkasa. Saat ini negara negara yang menjadi *spacefaring nations* adalah Amerika Serikat, Rusia, Perancis, India, Jepang, Korea Utara dan Tiongkok dengan kata lain *spacefaring* ialah negara negara yang mampu membangun dan meluncurkan sendiri satelit dan kendaraan antariksanya lihat Gregory P. Metzler, 2007. Tiongkok in Space, Implications for US Military. Joint Forces Quarterly. Vol. 47. 2007 hlm 23.

³ Space debris merupakan benda buatan manusia baik yang dikenal atau yang tidak dikenal pemiliknya, baik yang jatuh ke bumi maupun yang tersebar di antariksa melayang layang tidak terkontrol. Bisa berupa satelit yang telah berhenti beroperasi, pecahan satelit akibat terjadi ledakan, tabrakan atau satelit yang dengan sengaja dihancurkan. lihat *United nations, committee on the peaceful uses of outer space, A/AC. 105/C. 1/L.224, revision to the technical report on space debris of the scientific and technical subcommittee*"

yang terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah (U.S.–Tiongkok Economic and Security Review Commission, Tanpa Tahun). Selain penghakiman terhadap Tiongkok atas uji coba ASAT, dunia internasional kembali mempertanyakan struktur komando dalam program luar angkasa Tiongkok. Sebenarnya, masih terdapat ketidakjelasan akan kesadaran militer Tiongkok terhadap potensi puing antariksa tersebut, terlepas dari risiko yang ada (Kulacki, 2014). Mengesampingkan sudut pandang Tiongkok, masyarakat internasional menilai uji coba tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Skala puing antariksa yang dihasilkan dari uji coba ASAT membawa pandangan negatif terhadap program luar angkasa militer Tiongkok sepenuhnya. Dengan melihat kondisi ini maka Tiongkok kehilangan rasa kepercayaan oleh masyarakat internasional dengan semua kemajuan teknologi antariksanya, maka dari itu kerjasama antariksa secara multilateral di kawasan Asia Pasifik dinilai perlu demi upaya sphere influence Tiongkok di sector antariksa.

Kerjasama antariksa global (*global space governance*) diartikan sebagai sekumpulan dasar hukum dalam institusi nasional, regional, atau internasional yang mengatur atau mengendalikan urusan dan aktivitas luar angkasa. Secara detail, kerja sama antariksa global menaungi seluruh persetujuan, dasar hukum, serta mekanisme baik yang bersifat wajib atau sukarela yang berkaitan dengan aktivitas luar angkasa. *Outer Space Treaty* merupakan tulang punggung dari hukum antariksa internasional (Fawcett, 1968). Dalam artian luas, ranah 'luar angkasa' mengacu pada aktivitas manusia di luar lapisan atmosfer bumi. Berdasarkan deretan perjanjian internasional yang ada, antariksa merupakan kekayaan milik umat manusia yang tidak boleh diklaim sebagai wilayah negara mana pun. Lebih dari 100 negara telah meratifikasi perjanjian tersebut semenjak mulai berlaku pada 1967. *Outer Space Treaty* memuat pernyataan bahwa eksplorasi antariksa harus dengan tujuan upaya damai bagi setiap negara demi kebaikan umat manusia. APSCO hadir sebagai bentuk kerjasama antariksa global di kawasan asia pasifik berfungsi sebagai wadah untuk negara anggota melakukan kegiatan aktivitas antariksa yang sesuai dengan tujuan damai dalam penggunaan sektor antariksa (Adam, 2008). Untuk menganalisa APSCO sebagai upaya Tiongkok untuk membentuk CBMs di kawasan Asia pasifik maka perlu dijelaskan bagaimana proses Pertukaran informasi dan komunikasi dalam APSCO yang kemudian akan menghasilkan building trust dalam APSCO.

Mekanisme komunikasi dalam APSCO

Dengan perkembangan teknologi antariksa yang semakin pesat, dan disertai keinginan dari para aktor di bidang keantariksaan khususnya negara yang sangat terobsesi untuk mengeksplorasi dunia dan alam semesta, maka kondisi ini dengan sendirinya membawa potensi timbulnya masalah politik, pertahanan dan keamanan internasional yang semakin signifikan. Konsekuensi logis dari hal ini adalah antariksa menjadi wilayah yang berpotensi konflik seandainya tidak dilakukan sebuah upaya bersama untuk melindungi kawasan

antariksa. Sebagaimana diketahui bahwa akses terhadap kawasan antariksa akan dapat memberikan posisi penting bagi interaksi sebuah negara di dalam dunia internasional.

Tiongkok menjadi negara ketiga yang berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa di tahun 2003. Sejak saat itu, industri luar angkasa Tiongkok terus menunjukkan perkembangan secara signifikan (U.S.–Tiongkok Economic and Security Review Commission, 2015). Jejak teknologi antariksa Tiongkok terbilang sukses, baik secara domestik maupun dengan bantuan Rusia atau negara lainnya. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan dalam lingkaran politik internasional mengenai sumber teknologi antariksa Tiongkok. Terjadi keraguan oleh negara-negara lain untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok di sektor antariksa akibat kurangnya transparansi Tiongkok dalam program-program antariksanya. Prospek kerja sama antariksa secara global merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. (Stacey, 2006). Dengan hadirnya APSCO maka, Tiongkok memiliki wadah untuk melakukan program – program untuk mengurangi keraguan negara-negara lain untuk melakukan interaksi dengan Tiongkok di sektor antariksa.

Pertemuan Dewan APSCO pertama dijalankan pada tanggal 16-17 Desember 2008 di Beijing, seluruh perwakilan dari negara penandatangan Konvensi APSCO hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Indonesia. *United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific* (UNESCAP) yang merupakan salah satu komisi regional di bawah administrasi Persatuan (PBB) yang bertugas untuk mendorong kerja sama ekonomi antara negara-negara anggotanya, hadir dalam pertemuan tersebut sebagai pemantau. Dalam pertemuan dewan yang pertama ini menghasilkan rancangan untuk membuat *Proposal Data Sharing Service Platform and Its Application Pilot* (DSSP) dimana ini merupakan Sebuah solusi yang berawal dari kondisi atau keadaan yang ada dalam politik keamanan internasional yang membutuhkan adanya keterbukaan data dan ilmu, yang kemudian akan berguna untuk memastikan kemungkinan pertukaran pengetahuan secara maksimum dan pembangunan kapasitas kolaborasi negara anggota yang berpartisipasi (“The Role Of APSCO In Space Cooperation In The Asia Pasific Region”. <http://www.un-spider.org/sites/default/files/Session5RoleofAPSCOinSpaceCooperationintheAsiaPacificRegion.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019).

Melalui APSCO negara-negara anggota melakukan pertukaran informasi mengenai sektor antariksa. Tiongkok yang selama ini dinilai sebagai negara yang tidak bisa melakukan komunikasi dengan Negara lain atau dengan kata lain tertutup membuktikan bahwa hal itu tidak benar. APSCO sebagai wadah untuk Tiongkok melakukan komunikasi dengan negara lain setidaknya dengan tujuh anggota negara lainnya. Komunikasi terbentuk pada setiap pertemuan yang di adakan dimana pada pertemuan tersebut dibahas mengenai program dan rencana yang akan dilakukan oleh Negara-Negara yang menjadi anggota APSCO. Seperti pada pertemuan dewan APSCO yang ketiga diadakan pada September 2010. Pada pertemuan ini seluruh negara ang-

gota hadir dan Mr. Thaneerat Siriphachana, Wakil Sekretaris Tetap MICT, Thailand menjabat sebagai Ketua Dewan yang memimpin pertemuan. Mr. MD. Abdus Samad, Anggota SPARRSO dan Menteri MOD, Bangladesh, Mr Chen Qiufa, Wakil Menteri MIIT dan Administrator CNSA, Tiongkok hadir di rapat sebagai Wakil Ketua Dewan. Di pertemuan ini para dewan menyepakati adanya sebuah proyek edukasi keantariksaan ditetapkan dengan judul *Small Student Satellite Project (SSS Project)* ("About APSCO", <http://www.apsco.int/>, diakses 17 April 2019). Proyek SSS ini dirancang untuk mengembangkan satelit kecil yang kegiatannya berfokus pada pelatihan praktis pembuatan desain dan pengembangan satelit kecil. Proyek ini ditujukan sebagai pelatihan siswa dari berbagai fakultas dari negara-negara anggota untuk dapat membuat satelit sendiri melalui pelatihan praktis sampai pada tahap pembuatan satelit dari model yang dipelajari pada selama pelatihan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan sistem pendidikan teknologi keantariksaan di masing-masing negara Anggota. Target dari Proyek SSS ini adalah menciptakan kelompok inti untuk Proyek tersebut yang nantinya dapat membuat kesepakatan bersama untuk rencana pelaksanaan proyek lainnya di masa depan. Para peserta proyek ini berbagi informasi tentang sumber daya dan fasilitas yang tersedia di negara asal mereka, serta pengalamannya masing-masing. Dalam perencanaannya, proyek ini akan melakukan kerjasama dengan sejumlah universitas di Tiongkok.

Upaya Transparansi dalam APSCO

Tindakan yang bersifat transparansi meliputi langkah langkah yang mampu mendorong keterbukaan yang lebih besar atas informasi kemampuan dan kegiatan militer. Upaya transparansi tersebut dapat mencakup persyaratan pra-notifikasi, pertukaran data, dan secara sukarela memberikan ijin untuk mengamati latihan militer dan prosedur operasi. Salah satu tantangan terbesar dalam upaya Tiongkok melakukan hubungan di sektor antariksa adalah adanya ambisi dan pengelolaan program antariksa Tiongkok tidak transparan dan tidak dapat diterka. Oleh Amerika Serikat muncul dugaan kuat bahwa program antariksa Tiongkok digerakkan oleh *People's Liberation Army* tanpa adanya campur tangan rakyat sipil (Garretson dan Goswami, 2017) sehingga kompleksitas masalah Tiongkok dan negara-negara *spacefaring* lainnya dapat dikatakan berakar pada transparansi strategi militer. Dengan adanya keyakinan Negara-negara bahwa sektor antariksa dan dampaknya pada kehidupan didunia perlu dijaga kelestariannya, sehingga diperlukan *confidence building measure* atau keterbukaan didalam kebijakan dan perencanaan keantariksaan dalam suatu negara. Dimana masyarakat internasional menginginkan tindakan yang lebih bertanggung jawab dari para pemilik teknologi antariksa untuk dapat bersikap lebih transparan dalam setiap pengambilan kebijakan antariksanya (Garretson dan Goswami, 2017).

Pada pertemuan kedua rapat dewan APSCO diselenggarakan di Beijing, Tiongkok 17-18 Desember 2009. Para menteri terkait / wakil menteri dari delapan negara anggota dan penandatangan Konvensi APSCO menghadiri Rapat. Di pertemuan ini dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan untuk memprioritaskan rencana proyek dari rapat dewan pertama. Thailand akan memimpin proyek "*Research on Atmospheric Effects*" sedangkan Tiongkok dan Turki akan memimpin "*Asia Pacific Ground Based Satellite Observation System*"; dan Tiongkok sendiri akan memimpin "*Applications of Compatible Navigation Terminal System*". Kemudian dewan menyetujui Program Kolaborasi antara Thailand dan Tiongkok untuk mendirikan Stasiun Penerima Pemancar Darat demi terbukanya pembagian data dan membaginya pada negara-negara anggota APSCO melalui dari stasiun darat Thailand tersebut.

APSCO kemudian menjadi jalan untuk Tiongkok membangun kepercayaan internasional. Dimana di dalam kerjasama ini Tiongkok menginisiasi program program yang akan menggunakan *transparansi* di antara sesama negara-negara anggota APSCO. Seperti program yang dibahas pada Rapat dewan APSCO yang keempat yang merupakan pertemuan yang cukup unik karena lokasi pertemuan tidak lagi dilaksanakan di markas besar APSCO. Rapat dewan APSCO yang keempat dilaksanakan di Pattaya, Thailand pada Januari 2011 dihadiri dengan partisipan dari seluruh negara penandatangan Konvensi APSCO. Pada pertemuan ini disepakati bahwa pelaksanaan proyek APSCO yang sudah direncanakan mulai dari rapat dewan yang pertama yaitu disepakati adanya Proposal *The APSCO Applied High Resolution Satellite Project (APRS)* harus memberikan prioritas kepada Negara Anggota dari APSCO sambil mempertahankan keterbukaan kepada semua negara anggota, sesuai dengan persetujuan Dewan. Melalui High-Resolution Satellite System negara-negara anggota APSCO akan mendapatkan manfaat dalam sektor-sektor berikut (1) Pemantauan hutan dan pertanian (2) Pemantauan dan perhitungan bencana (3) Eksplorasi mineral (4) Mempromosikan dan memperkuat pengembangan kolaborasi program antariksa antara negara anggota dengan mendirikan dasar bagi kerjasama dalam aplikasi damai ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa (5) Menyusun kebijakan industri untuk memenuhi persyaratan dari program dan kegiatan serta program kolaboratif dengan Negara Anggota, dengan cara yang hemat biaya dan penerapan sistem "*fair-return*" (7) Mengatur aktivitas dasar organisasi, yang harus didasari pada kepentingan organisasi.

Untuk menilai seberapa besar transparansi dalam APSCO dapat dilihat dari upaya verifikasi yang dilakukan. Tindakan verifikasi ini dirancang dalam rangka untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dari aspek kepatuhan setiap negara anggota terhadap perjanjian tertentu dalam APSCO. Aspek kepatuhan ini termasuk di dalamnya inspeksi lapangan yang didasarkan kepada sistem sensor elektronik pada proyek yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya yang ada di antariksa (SDA) dan kapabilitas dalam sektor keantariksaan dari negara-negara anggota APSCO (SDM) untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dalam

pengembangan teknologi keantariksaan dan penggunaan data-data yang merupakan bentuk kepatuhan anggota APSCO. Program ini merupakan salah satu bentuk verifikasi dalam APSCO. Adapun bentuk pembatasan di dalam APSCO tercantum dalam peraturan – peraturan yang telah disepakati oleh setiap anggota.

Keberhasilan *Trust Building* melalui APSCO

Kondisi tatanan internasional diliputi oleh kondisi dimana ketidakpercayaan yang sangat rentan beresiko menimbulkan bahaya, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah bangunan yang didasarkan kepada kepercayaan antar bangsa dan antar negara. Selanjutnya kepercayaan tersebut dari segi perilaku manusia dapat dicapai dengan tindakan transparansi, keterbukaan dan prediktabilitas seperti melalui pertukaran berbagai informasi. Selain itu dengan penerapan konsep saling percaya khususnya di bidang antariksa dalam wujud CBMs akan berpotensi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita tentang lingkungan antariksa (Cossa, 1998). Pemahaman terhadap perlindungan wilayah antariksa ini dapat kita capai dengan melihat pentingnya wilayah atau kawasan-kawasan yang menjadi tumpukan sampah di orbit, kepekaan terhadap kondisi situasional dari antariksa, dan menghindari terjadinya tabrakan serta mengambil tindakan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kedekatan dan kepercayaan dan keberanian mendorong keterbukaan diantara aktor-aktor antariksa.

Upaya Tiongkok untuk membentuk rasa percaya dapat dilihat melalui pembahasan pada Rapat Dewan APSCO yang kelima yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok pada September 2011 dan dihadiri oleh seluruh negara penandatangan Konvensi APSCO. Mr. Khondaker M. Asaduzzaman, Sekretaris MOD, Bangladesh, dalam rapat ini menjabat sebagai Ketua Dewan APSCO, sementara Mr Chen Qiufa, Wakil Menteri MIIT dan Administrator CNSA, China menjabat Wakil Ketua Dewan APSCO. Pada pertemuan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan program *High Resolution Satellite Project*, negara-negara anggota APSCO didukung oleh program *Small Multi-Mission Satellite* yang sebelumnya sudah dibangun oleh China, Iran, Republik Korea, Mongolia, Pakistan dan Thailand. Program ini bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan kemajuan teknologi dan aplikasi antariksa di kawasan Asia Pasifik. Melalui program program APSCO dapat di analisis bahwa Tiongkok sedang membangun konsep kepercayaan. Konsep saling percaya yang dibangun dalam pemahaman CBMs ini juga dapat dilakukan baik konteks global maupun konteks regional, secara bilateral, multilateral atau unilateral.

Tiongkok sebagai pemain baru dalam sector antariksa perlu untuk menjaga kepercayaan internasional. Peningkatan kapabilitas antariksa Tiongkok yang kemudian direspon secara negative membuat posisi negara ini menjadi tidak aman. Kondisi tidak aman ini terbentuk karena Tiongkok akan selalu dinilai sebagai ancaman oleh negara lain. Persaingan diantara negara *spacefaring* membuat Tiongkok melakukan strategi

dengan menggunakan *soft power* seperti diplomasi dengan menawarkan kerjasama. APSCO kemudian menjadi instrument yang digunakan Tiongkok untuk mendapatkan trust building masyarakat internasional terbukti berhasil. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya negara negara yang ingin melakukan kerjasama dengan Tiongkok baik itu secara bilateral (Office for Science & Technology of the Embassy of France in the United States, 2018) dan multilateral (Huang, 2019) di sektor antariksa. Selain itu komplain yang didapatkan Tiongkok pada sector antariksa juga semakin berkurang setelah terbentuknya APSCO. Sebelumnya pengaduan yang dilontarkan pada negara ini mengacu pada aktivitas ruang angkasa yang dinilai berbahaya dan mengancam keberadaan satelit satelit negara lain. Akan tetapi setelah Tiongkok membentuk APSCO maka masyarakat internasional melihat aktivitas tersebut merupakan bagian dari penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai sesuai hukum internasional (Mingmei, 2019) dan tidak untuk membahayakan satelit lain (Johnson, 2019)

Perubahan pandangan masyarakat internasional pada peningkatan kapabilitas antariksa Tiongkok menunjukkan bahwa APSCO bisa menjadi salah satu *tools* dalam melaksanakan kepentingan perluasan wilayah pengaruh atau *sphere of influences* Tiongkok di tataran internasional dengan menggunakan keunggulan dari teknologi antariksa. Tiongkok berhasil memimpin setidaknya delapan negara dengan mendirikan APSCO. Tiongkok memiliki harapan yang tinggi untuk menarik kekuatan-kekuatan antariksa dalam satu kelompok dalam APSCO dimana Tiongkok dapat melakukan upaya upaya penelitian bersama dan pertukaran data, tentunya dengan memposisikan Tiongkok sebagai pemimpinnya.

Posisi Tiongkok dalam hal ini ialah ingin memberikan bantuan produk dan jasa antariksa kepada negara-negara di kawasan asia pasifik dilakukan oleh Tiongkok dengan berprinsip kepada persamaan, manfaat bersama, dan untuk pemanfaatan damai. Adapun prinsip tersebut tertuang didalam buku putih keantariksaan Tiongkok tahun 2006 (Franklin, 2005). Prinsip-prinsip tersebut dari tahun ke tahun mengalami perbaikan atau revisi hingga pada tahun 2011. Dalam hal kerjasama ini Tiongkok sejak tahun 2006 telah menerapkan pertukaran dan kerjasama antariksa internasional dalam berbagai bentuk. Kemudian Tiongkok juga telah menandatangani sejumlah perjanjian memorandum kerjasama dalam pemanfaatan antariksa untuk maksud damai dengan sejumlah negara, lembaga antariksa dan organisasi internasional (Chen dan Feffer, 2009).

KESIMPULAN

Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) merupakan bentuk kerjasama regional yang pembentukannya di inisiasi oleh Tiongkok dimana anggotanya meliputi delapan negara yaitu Bangladesh, Tiongkok, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, Turki dan Thailand. APSCO merupakan realisasi dari bentuk kerjasama yang

secara aktif meningkatkan aktivitas multilateral dalam teknologi dan aplikasi antariksa di kawasan Asia Pasifik dengan menerapkan tujuan damai. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menganalisis inisiatif Tiongkok membentuk APSCO adalah dengan melihat bahwa kerjasama multilateral ini merupakan bentuk strategi *Confidence Building Measure* (CBMs).

Penggunaan *Confidence Building Measure* (CBMs) tidak dilihat sebagai instrumen untuk mengurangi kebebasan aktivitas antariksa atau program nasional dari setiap aktor yang terlibat, melainkan diarahkan untuk tujuan damai dan mematuhi hukum antariksa. CBMs digunakan oleh Tiongkok sebagai instrumen untuk menetapkan ketentuan penting dalam hal mengurangi perkembangan ancaman di sektor antariksa. Adapun perkembangan sector antariksa Tiongkok yang menimbulkan reaksi beragam dan tidak sedikit yang melihat perkembangan Tiongkok sebagai ancaman.

Strategi Tiongkok untuk membentuk *Confidence Building Measure* (CBMs) melalui APSCO dikawasan Asia Pasifik bertujuan untuk membuat negara-negara lain untuk melihat kemampuan teknologi antariksa bukan sebagai hal negatif apalagi sebuah ancaman karena hal ini akan sangat berkaitan dengan upaya membangun pengaruh diplomatik dimana kehadiran Tiongkok akan selalu dibandingkan dengan posisi negara *spacefaring* lainnya. Amerika Serikat telah memiliki aktivitas antariksa yang signifikan di kawasan Asia Pasifik, dan perkembangan kemampuan teknologi antariksa Tiongkok kemudian menghadirkan perebutan pengaruh diplomatik dikawasan ini. Tiongkok sebagai negara yang berhasil mengembangkan program antariksanya merasa bahwa memperkuat posisi dan pengaruh diplomatiknya dikawasan Asia pasifik merupakan agenda penting dalam upaya untuk menjaga keaamanan antariksanya. Dengan membentuk APSCO maka kerjasama multilateral ini dijadikan intrumen untuk membangun kepercayaan internasional dan melalui CBMs Tiongkok berusaha menunjukkan mekanisme komunikasi hingga transparansi yang kemudian mampu membentuk *trust building* sehingga dapat mencegah tumbuhnya potensi-potensi konflik di sektor antariksa.

DAFTAR PUSTAKA

Asia-Pasific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Bangladesh"
<http://www.apsco.int/html/comp1/content/Bangladesh/2019-02-19/14-248-1.shtml> diakses 10 September 2019.

Asia-Pasific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Iran"
<http://www.apsco.int/html/comp1/content/Iran/2018-06-27/46-159-1.shtml> diakses 10 September 2019.

- Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Mongolia" diakses <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Mongolia/2019-02-20/47-250-1.shtml> diakses 10 September 2019.
- Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Pakistan". <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Pakistan/2018-07-03/48-168-1.shtml> diakses 10 September 2019.
- Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Thailand". <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Thailand/2018-07-03/50-169-1.shtml> diakses 10 September 2019.
- Asia-Pacific Space Cooperation organization (APSCO). Tanpa Tahun. "Turkey". <http://www.apsco.int/html/comp1/content/Turkey/2019-02-20/51-251-1.shtml> diakses 10 September 2019
- Alice D. 2003. "China and ASEAN: Renavigating Relation fo 21st Century Asia", *Asian Survey*, Vol. 43, No.4
- Chaudhry, Maqbool Ahmad and Zang Wei. 2013. "Role of Asia Pascific Space Cooperation Oganizaion in Advancing Space Technology and Its Applications in The Asia Pacific Region". *2013 6th international conference on recent advances in space technologies* (RAST).
- Chen, Sean and Feffer, John. 2009. "China's Military Spending: Soft Rise Or Hard Threat?". *Journal of Asian Perspective* Vol. 33, No. 4, *Special issue on Arms Race in Northeast Asia*, hal. 47-67.
- Chen, D.K. – W. and S. Wan. 2009. "Space Cooperation in the Asia Pacific : The Story Of APSCO and APRSAF". *American Institute of Aeronautics and Astronautics* (AIAA, hal. 42 – 52.
- Evgeniia, Drozhashchikh. 2018. "China's National Space Program and the 'China Dream'" . *The International Journal of Space Politics & Policy*. Volume 16, hal. 175 – 186.
- Fawcett, James Edmund Sandfor. 1968. *International Law And The Uses Of Outer Space Treaty*. Manchester U.P
- Fukushima, Akiko. 2015. "Multilateral Confidence Building Measures In Northeast Asia : Receding Or Emerging?". https://www.beyondintractability.org/essay/confidence_building_measures diakses 29 april 2019.
- Franklin, Allen, Qian Jun dan Qian Meijun. 2005. "Law, Inance And Economic Growth In China", *Journal of Finace Economic*. Vol 77, Issue 1, hal 57-116.
- Garretson, Peter dan Namrata Goswami, "Are China and the US Set for a Showdown in Space?," *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2017/01/are-china-and-the-us-set-for-a-showdown-in-space/>, diakes 10 September 2019.
- Gilks, Anne. 1997. "Tiongkok's Space Policy: Review And Prospects". *Space Policy*. Vol 13, Issue 3.

- Glosserman, Brad. 2005. "Cross-Strait Confidence Building Measure". *Issue & Insights* Vol 5 No 2.
- Govt. White Papers. 2000. "Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Beijing".
<http://www.china.org.cn/e-white/8/index.htm> diakses 23 Maret 2019.
- Huang, Echo. 2019. "The Small Ways NASA Still Cooperates With Tiongkok's Space Program, Despite A Ban"
diakses dari <https://qz.com/1523812/nasa-and-china-cooperated-in-recent-landing-on-far-side-of-the-moon/>, diakses 18 Mei 2019
- Johnson, Stephen. 2019. "China Refutes US Claim That Is Pushing Space "Arms Race". *BIG THINK*
<https://bigthink.com/politics-current-affairs/china-space>, diakses 18 Mei 2019.
- Kulacki, Gregory. 2014. *An Authoritative Source on China's Military Space Strategy*. Cambridge: Union of Concerned Scientists.
- Landau, Daryl dan Sy Landau. 1997. "Confidence-Building Measures in Mediation". *Mediation Quarterly*, Vol. 15, no. 2.
- Lewis, James A. 2007. "Space and National Security", *NEC Space and Defense Forum*, Tokyo: CSIS
- Mingmei. 2019. "China To Promote Space Cooperation For UN Sustainable Development"
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/24/c_138006139.htm, diakses 18 Mei 2019 .
- Nie, Mingyang. 2019. "Asia Space Cooperation And Asia-Pacific Space Cooperation Organization : An Appraisal In The Belt And Road Space Initiative Context". *Space policy* .
- Office for Science & Technology of the Embassy of France in the United States. 2018. "France-China Space Cooperation - Cfosat In Orbit". <https://www.france-science.org/France-China-space-cooperation.html>, diakses 18 Mei 2019.